KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR Minta Duit 6.8 Triliun Tanpa Jelas Rinciannya
Tanggal : Jumat, 24 April 2015
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

DPR Minta Duit 6,8 Triliun Tanpa Jelas Rinciannya

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR diam-diam mengajukan anggaran sebesar Rp 6 triliun. Anggaran dibuat bulat tanpa perincian detail.

WAKIL Ketua DPR Agus Hermanto menjelaskan, anggaran Rp 6,8 triliun yang diajukan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR ditujukan untuk kegiatan Sekretariat Jenderal DPR.

"Ini belum definitif, baru indikatif. Ini baru nanti yang diajukan pemerintah, dibicarakan ke pemerintah anggaran sebesar itu. Yang disetujui nanti belum tentu segitu, itu tergantung pembicaraan dengan pemerintah," kata Agus di gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Untuk diketahui, BURT merupakan alat kelengkaopan DPR. Saat ini, BURT dipimpin politisi Partai Golkar, Roem Kono.

Menurut politikus Partai Demokrat itu, kemungkinan anggaran juga ditujukan untuk pembangunan museum dan perpustakaan DPR seperti yang sudah diajukan sebelumnya, sebagai bagian dari upaya menjadikan parlemen Indonesia menjadi parlemen modern.

"Bisa jadi masuk di situ (pembangunan museum dan perpustakaan). Kita lihat nanti detailnya dalam pembahasan. Ini kan masih anggaran indikatif," jelasnya.

Soal rencana renovasi gedung parlemen, Agus berpendapat, bisa juga termasuk ke anggaran renovasi Gedung DPR yang

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

sudah cukup tua. Hanya saja, untuk detail rencana hal itu dapat diketahui ketika sudah masuk ke pembahasan. Sementara ini baru diajukan kepada pemerintah.

Selain itu, mengenai rencana polisi parlemen, menurutnya, masih sekadar wacana dari beberapa anggota yang kemudian dikonfirmasi ke pimpinan DPR sehingga tereks-pose ke media masaa. "Jadi, masih 'jauh panggang dari api.' Masih taraf wacana," tegasnya.

Lagi pula, Agus menambahkan, pengajuan Rp 6,8 triliun anggaran di tahun 2016 ini kenaikannya tidak cukup signifikan jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2015 yang besarannya Rp 5,1 triliun. Terlebih, tenaga ahli (TA) anggota yang jumlahnya ditambahkan sementara sebelumnya hanya satu orang.

"Jadi, ini pagu indikatif yang nantinya akan dibicarakan dengan pemerintah untuk mendapatkan pagu yang sebenarnya," pungkasnya. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mendesak adanya transparansi dalam pengajuan anggaran bernilai triliunan itu. Pasalnya, anggaran tersebut hanya dilaporkan besarannya oleh pimpinan BURT DPR tanpa ada penjelasan penggunaannya.

"Nah itu dia masalahnya. BURT ini tidak transparan. Program-program yang mereka rancang terkesan berbau proyek semata," sesal Research Manager Formappi, Lucius Karus.

Dia berpendapat, seharusnya BURT DPR menjelaskan secara detail mengenai program sekretariat DPR yang katanya untuk membangun parlemen modern. "Kan parameter parlemen modern itu transparansi. Bagaimana bisa modern kalau baru-baru mulai begini sudah tidak transparan," tukasnya.

Mengenai anggaran Rp 6,8 triliun, Lucius berpandangan, terlalu besar. Kalaupun alasannya penambahan jumlah TA anggota Dewan, tentu tidak akan sebesar itu. "Apalagi perencanaan penggunaan anggaran tidak dilakukan dengan baik," tambahnya.

Dengan tidak adanya transparansi, terkesan tidak ada format yang jelas dalam perencanaan DPR. Sehingga proyek-proyek yang diusulkan mengada-ada dan mengundang protes publik.

Kata Lucius, bisa saja proyek pembangunan gedung baru DPR dan sejenisnya sudah masuk ke dalam jumlah anggaran yang besar itu. Dengan kata lain, kesetjenan dan pimpinan DPR diam-diam merencanakan pembangunan gedung baru, "Ini berarti ada konspirasi." ■ ONI/JPNN